



# **LKPJ**

# **DINAS KESEHATAN**

# **TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KESEHATAN** *Jl. M.Natsir No.2 Simpang Empat,*  
*Pasaman Barat*

### BAB III

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan	PERDA Kab.Pasaman Barat No 17 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 47.906.805.195	Rp.32.987.459.459 (69,53%)			
			PERDA Kab. Pasaman Barat No 6 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada unit Pelayanan Sarana Kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot	Rp.17.737.683.873	Rp.14.208.030.295 (78,94%)			
			PERBUP Pasaman Barat No 117 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-			
			Perbup Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Tekhnis Pusat Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	-			
			Perbup Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Tekhnis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat	Pengembangan rumah sakit (RS. Ujung Gading)	Rp1.124.229.498	Rp.874.969.447			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATSI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
			Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat	Pengembangan Puskesmas	Rp 213.737.850	Rp.213.674.650			
			Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.4.245.586.500	Rp.4.243.563.400			
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.3.704.321.812	Rp.3.014.134.000 0	Tidak ada kendala, hanya menyesuaikan dengan hasil DESK dengan Kementerian Kesehatan, untuk Harmonisasi kegiatan anggarannya lebih rendah daripada pagu anggaran perpres	Usulan disesuaikan dengan kebutuhan	
				Pengadaan Obat, Vaksin	Rp.3.255.970.380	Rp.2.495.493.969	Kenaikan pajak 11% sehingga ada beberapa harga obat yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun disebabkan sistem penganggaran per item	Untuk belanja obat sedapat mungkin tidak entry per item cukup paket	
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp.5.032.929.833	Rp.2.932.835.329	Pengadaan disesuaikan dengan stok yang masih ada dan kebutuhan (Catridge TCM)	Untuk belanja bmkp sedapat mungkin tidak entry per item cukup paket	
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.26.067.536.444	Rp.18.690.791.864			
				Pengolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 280.084.015	Rp.134.909.750	Dimasa pasca bencana banyak kegiatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi yang membuat waktu kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan jadi sedikit	Memaksimalkan semua waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Menyamakan tujuan kegiatan lintas sektor dengan tujuan program kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp.622.479.000	Rp.72.701.000	<p>Dimasa pasca bencana banyak kegiatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi yang membuat waktu kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan jadi sedikit.</p> <p>Tahun 2022 penggunaan Jampersal berubah dari tahun sebelumnya dimana pembiayaan pelayanan persalinan dimasukkan melalui BPJS dengan peserta melalui aplikasi eKohort.</p> <p>Validasi peserta Jampersal melalui puskesmas..dinas kesehatan..Kemenkes dan BPJS.. setelah validasi dari BPJS baru pasien Jampersal bisa dilayani. Juknis tentang Pasien Jampersal keluaranya dan diterima kab tgl 25 Agustus 2022. Sehingga pasien yg akan menggunakan jampersal sdh banyak yg melahirkan.</p> <p>Kegiatan yg ada di Jampersal thn 2022 adalah RTK, Konsumsi RTK ,BBM Rujukan, Sewa kendaraan berpenumpang utk merujuk pasien dan Transportasi petugas memantau pasien di RTK.</p> <p>Utk rujukan yg di bayarkan adalah BBM atau sewa kendaraan berpenumpang, tetapi petugas merujuk tdk bisa dibayarkan, sehingga puskesmas tdk menggunakan dana Jampersal dlm merujuk pasien. Pasien di RTK tidak ada, sehingga konsumsi pasien tidak ada</p>	Memaksimalkan semua waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Menyamakan tujuan kegiatan lintas sektor dengan tujuan program kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATSI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp.21.470.000	Rp.15.500.000	Dimasa pasca bencana banyak kegiatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi yang membuat waktu kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan jadi sedikit	Memaksimalkan semua waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Menyamakan tujuan kegiatan lintas sektor dengan tujuan program kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp.43.230.000	Rp.26.610.000	Dimasa pasca bencana banyak kegiatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi yang membuat waktu kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan jadi sedikit	Memaksimalkan semua waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Menyamakan tujuan kegiatan lintas sektor dengan tujuan program kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Balita. Melibatkan semua lintas program dalam kegiatan yang dilaksanakan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp.73.900.000	Rp.66.659.500	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar hanya dilaksanakan di Sekolah/ sarana pendidikan formal dan belum terlaksananya pemeriksaan pada anak di fasilitas informal atau yang tidak bersekolah	Aktifkan Posyandu remaja di setiap jorong untuk meningkatkan prevalensi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp.73.979.900	Rp.60.208.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan Dinas untuk suovervisi ke lapangan tidak mencukupi . karena sering rusak dan mobil lainnya dipakai bidang lain.</li> <li>Realisasi dana lebih kecil dari pada yang di entry di SIPD sehingga terdapat sisa dana dari anggaran awal. Seperti : realisasi pada perjalanan dinas luar daerah, realisasi pada kegiatan pertemuan luar daerah yang hanya di bayarkan Rp. 120. 000 jrealisasi pada bahan cetak leaflet</li> <li>Ada kegiatan deteksi dini IVA dan Kanker payudara yang didanai oleh provinsi pada bulan Oktober., sehingga perjalanan pada bulan itu memakai dana provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mohon perbaiki mobil dinas , dibagi jadwal mobildan sopir perbidang dan perseksi agar lebih bisa dimanfaatkan dengan efisien.</li> <li>Mengalihkan dana yang masih banyak tersisa ke kegiatan lain yang dirasa perlu pada saat perubahan anggaran..</li> </ul>	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp.30.205.000	Rp. 19.289.000	<p>Dimasa pasca bencana banyak kegiatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi yang membuat waktu kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan jadi sedikit</p> <p>Narasumber kegiatan pertemuan lansia masih di tingkat provinsi sehingga dibutuhkan kesesuaian waktu untuk menyamakan jadwal dengan kab/kota lainnya.</p>	<p>Memaksimalkan semua waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Menyamakan tujuan kegiatan lintas sektor dengan tujuan program lansia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Usia Lanjut.</p>	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp.37.004.900	Rp.28.792.800	<p>Kendaraan Dinas untuk supervisi ke lapangan tidak mencukupi . karena sering rusak dan mobil lainnya dipakai bidang lain.</p> <p>Realisasi dana lebih kecil dari pada yang di entry di SIPD sehingga terdapat sisa dana dari anggaran awal. Seperti : realisasi pada perjalanan dinas luar daerah, realisasi pada kegiatan pertemuan luar daerah yang hanya di bayarkan Rp. 120. 000 jrealisasi pada bahan cetak leaflet</p>	<p>Mohon perbaiki mobil dinas , dibagi jadwal mobildan sopir perbidang dan .perseksi agar lebih bisa dimanfaatkan dengan efisien.</p> <p>Mengalihkan dana yang masih banyak tersisa ke kegiatan lain yang dirasa perlu pada saat perubahan anggaran..</p>	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Rp.10.000.000	Rp.6.915.500	<p>Kendaraan Dinas untuk supervisi ke lapangan tidak mencukupi . karena sering rusak dan mobil lainnya dipakai bidang lain.</p> <p>Realisasi dana lebih kecil dari pada yang di entry di SIPD sehingga terdapat sisa dana dari anggaran awal. Seperti : realisasi pada perjalanan dinas luar daerah, realisasi pada kegiatan pertemuan luar daerah yang hanya di bayarkan Rp. 120. 000 realisasi pada bahan cetak leaflet</p>	<p>Mohon perbaiki mobil dinas , dibagi jadwal mobildan sopir perbidang dan .perseksi agar lebih bisa dimanfaatkan dengan efisien.</p> <p>Mengalihkan dana yang masih banyak tersisa ke kegiatan lain yang dirasa perlu pada saat perubahan anggaran.</p>	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp.30.165.000	Rp.26.719.500	<p>Kendaraan Dinas untuk supervisi ke lapangan tidak mencukupi . karena sering rusak dan mobil lainnya dipakai bidang lain.</p> <p>Realisasi dana lebih kecil dari pada yang di entry di SIPD sehingga terdapat sisa dana dari anggaran awal. Seperti : realisasi pada perjalanan dinas luar daerah, realisasi pada kegiatan pertemuan luar daerah yang hanya di bayarkan Rp. 120. 000 jrealisasi pada bahan cetak leaflet</p>	<p>Mohon perbaiki mobil dinas , dibagi jadwal mobildan sopir perbidang dan .perseksi agar lebih bisa dimanfaatkan dengan efisien.</p> <p>Mengalihkan dana yang masih banyak tersisa ke kegiatan lain yang dirasa perlu pada saat perubahan anggaran..</p>	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp.14.717.100	Rp.14.533.500	<p>Kegiatan ini tidak ada permasalahan dimana kegiatan ini secara fisik telah terlaksananya 100%</p>	<p>Karena kegiatan ini secara fisik telah terlaksana 100% jadi untuk kegiatan ini tidak ada upaya dalam mengatasi permasalahan</p>	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp.16.060.950	Rp.13.338.000	Kegiatan ini secara fisik telah terlaksananya 100% tetapi ada kelebihan keuangan untuk BBM dan perjalanan dinas luar daerah dimana untuk BBM karena kekurangan kendaraan dinas operasional sehingga untuk perjalanan dinas pakai kendaraan umum untuk pencairannya sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah karena untuk kegiatan pertemuan lebih dari 1 hari dibayarkan 120.000 perhari	Untuk kendaraan dinas operasional dikelola dengan baik adanya jadwal perseksi jadi tidak dable dalam penggunaannya. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam perencanaannya lebih efisien lagi	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp.121.000.000	Rp.43.360.000	Tidak ada masalah pada sub kegiatan sehubungan dengan penurunan kasus Covid-19		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp.1.747.861.350	Rp.1.539.863.050	Tidak ada masalah pada sub kegiatan ini sehubungan dengan penurunan kasus Covid-19 dan capaian vaksinasi sudah lebih dari 70%, pada sub kegiatan ini ada pembayaran hutang belanja tahun 2021 untuk pembayaran uang lelah Vaksinator, Swab, Makan-Minum, BBM, dll.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.653.802.000	Rp.521.059.181	Beberapa kegiatan gizi masyarakat dilakukan bersamaan dengan program promkes dan lintas sektor, dan monitoring evaluasi program gizi tidak semua puskesmas dapat dilakukan.	Akan dilakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor mulai dari perencanaan sampai monitoring evaluasi	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.82.312.500	Rp.30.885.750	Pelaksanaan kegiatan baru bisa dimulai setelah bulan juli karena pandemic covid-19 ada nya perubahan juknis DAK Non Fisik serta menunggu dana pergeseran di sah kan	Selama pandemic covid 19 kegiatan tidak yang dilakukan monev program ke puskesmas. Berkoordinasi dengan bagian perencanaan terkait dengan perubahan juknis DAK Non fisik dan pengesahan anggaran pergeseran	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATSI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.421.889.000	Rp.307.446.250	Pelaksanaan kegiatan baru bisa dimulai setelah bulan juli karena pandemic covid-19 Ada nya perubahan juknis DAK Non Fisik serta menunggu dana pergeseran di sah kan	Selama pandemic covid 19 kegiatan tidak yang dilakukan monev program ke puskesmas. Berkoordinasi dengan bagian perencanaan terkait dengan perubahan juknis DAK Non fisik dan pengesahan anggaran pergeseran	
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp.121.100.000	Rp.116.219.000	Promosi kesehatan belum dilaksanakan secara menyeluruh di Kabupaten Pasaman Barat baik melalui Media maupun penyuluhan dan sosialisasi langsung Adanya kelebihan dalam penganggaran Honor Narasumber kegiatan pertemuan di DPA	Meningkatkan Anggaran media promosi kesehatan untuk tahun 2023  Dapat menyesuaikan rencana kebutuhan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2023	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp.40.000.000	Rp.33.617.500	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan, untuk perjalanan dinas pada subkegiatan ini satu Tim dengan kegiatan PISPK yang dibiayai oleh APBN, sehingga belanja perjalanan dinas tdk terealisasi.		
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp.64.230.000	Rp.60.063850	Tidak ada masalah		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp.0	Rp.0			
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp.600.000.000	Rp.600.000.000 (100%)	Tidak ada masalah		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp.151.300.800	Rp.131.793.750	Kegiatan ini secara fisik telah terlaksananya 100% tetapi ada kelebihan keuangan untuk BBM dan perjalanan dinas luar daerah dimana untuk BBM karena kekurangan kendaraan dinas operasinal sehingga untuk perjalanan dinas pakai kendaraan umum untuk pencairannya sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah kerena untuk kegiatan pertemuan lebih dari 1 hari dibayarkan 120.000 perhari	Untuk kendaraan dinas operasional dikelola dengan baik adanya jadwal perseksi jadi tidak dable dalam penggunaaannya. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam perencanaannya lebih efisien lagi	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp.17.781.261.600	Rp.14.364.725.800	Adanya dana tambahan yang masuk di saat anggaran perubahan sebesar Rp. 3.000.000.000 (untuk pembiayaan di RSUD yakni belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan pelayanan BPJS	Telah di susun peraturan bupati pasaman barat tentang pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta program Jaminan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD Pasaman Barat tapi tidak di setujui oleh kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia.	
				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp. 29.229.900	Rp.24.096.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan Dinas untuk suovervisi ke lapangan tidak mencukupi . karena sering rusak dan mobil lainnya dipakai bidang lain.</li> <li>Realisasi dana lebih kecil dari pada yang di entry di SIPD sehingga terdapat sisa dana dari anggaran awal.</li> <li>Seperti : realisasi pada perjalanan dinas luar daerah, realisasi pada kegiatan pertemuan luar daerah yang hanya di bayarkan Rp. 120. 000 realisasi pada bahan cetak leaflet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mohon perbaikan mobil dinas , dibagi jadwal mobildan sopir perbidang dan .perseksi agar lebih bisa dimanfaatkan dengan efisien.</li> <li>Mengalihkan dana yang masih banyak tersisa ke kegiatan lain yang dirasa perlu pada saat perubahan anggaran.</li> </ul>	
				Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Rp.18.200.000	Rp.12.333.376	Belum terbentuknya Forum Kabupaten Sehat Pasaman Barat periode 2022-2027 sehingga untuk monitoring ke forum kecamatan sehat belum bisa dilakukan	Berkoordinasi dengan Tim Pembina KKS (Bappeda) untuk membentuk forum Kabupaten Sehat Pasaman Barta	
				Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	Rp.371.249.000	Rp.371.249.000 (100%)	Tidak ada masalah		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATSI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Operasional Pelayanan Puskesmas Rumah Sakit	Rp.229.756.062	Rp.0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga DPA/RKA sebelum perubahan dibawah harga e-katalog dan item obat yang diusulkan tidak sesuai dengan RKO (Rencana Kebutuhan Obat) Rumah Sakit Ujung Gading, sehingga dilakukan pengusulan di perubahan anggaran tahun 2022.</li> <li>2. Harga di pihak ke tiga di aplikasi e-katalog masih pajak 10%, sedangkan kebijakan tahun 2022 pajak sudah 11%. Pihak ketiga akan mengajukan total tagihan pajak 11% (berbeda dengan total harga di e-katalog).</li> <li>3. Setelah dilakukan negosiasi harga dengan pihak ketiga, pihak ketiga menolak karena quantity (jumlah) masing-masing obat yang mau dibelanjakan sedikit.</li> </ol>	Operasional Rumah Sakit Ujung Gading akan dicover oleh Pengadaan Obat Kabupaten Tahun 2022, karena status Rumah Sakit berubah menjadi FKTP.	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Rp.1.604.842.935	Rp.258.894.782	Pelayanan Pengobatan Gratis di FKTP/Puskesmas belum maksimal dimanfaatkan masyarakat.	Tahun 2023 telah diberlakukan UHC (Universal Health Corporate) di Kabupaten Pasaman Barat	
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Labkesda)	Rp. 61.686.461	Rp.86.756.000	Perjalanan dinas tidak terealisasi sepenuhnya karena structural dan operasional Labkesda secara resmi baru ada dibulan November 2022	Menyesuaikan rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan di DPA	
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD IFK)	Rp.39.074.400		Perjalanan dinas penjemputan vaksin yang tidak bisa dilakukan terjadwal karena tergantung pada ketersediaan vaksin di provinsi kadang bisa 2 kali dalam sebulan ketidakstabilan harga bbm membuat ketersediaan anggaran berkurang		

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATSI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp.497.438.000	Rp.16.794.250	Survei tidak melaksanakan survei akreditasi terhadap 11 FKTP karena Komisi Akreditasi FKTP tidak mengeluarkan Surat Perintah Tugas sehubungan belum dicabutnya status pandemic nasional.	Kementerian Kesehatan mengeluarkan Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha bidang Pelayanan Kesehatan.	
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp.25.000.000	Rp.24.510.650	Tidak ada masalah		
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp.117.497.020	Rp.32.196.125	Pelaksanaan kegiatan PSC belum sesuai dengan PMK Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat darurat Terpadu	Kegiatan yang bisa dilakukan P3 K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara	Rp.14.226.000	Rp.3.500.000			
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp.14.226.000	Rp.3.500.000	Untuk perjalanan dinas pada subkegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBN, sehingga belanja perjalanan dinas tdk terealisasi.	Adanya sinkronisasi antara Dinkes Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan SIK, agar tidak overlapping dlm penganggaran	
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp.0	Rp.0	Kegiatan ini merupakan pengadaan Sistem Informasi yang bersumber DAK, namun pada awal April muncul Surat Edaran dari Kemendagri tentang nomenklatur kegiatan yang mengharuskan pada subkegiatan Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan Kesehatan, sehingga subkegiatan ini menjadi 0	Kemenkes sebaiknya mengeluarkan edaran tentang nomenklatur subkegiatan agar tidak terjadi pergeseran subkegiatan di tahun berjalan, karena akan menghambat kegiatan	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.87.358.878	Rp.85.137.300			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp.87.358.878	Rp.85.137.300	Tidak ada masalah pada sub kegiatan.		

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp.157.240.000	Rp.55.023.400			
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp.16.065.000	Rp.13.450.000	Pada kegiatan ini belanja perjalanan dinas tidak dapat di bayarkan sepenuhnya dikarenakan banyak memenuhi undangan kegiatan fullboard dan fullday, dan ini sudah diatur pada standar biaya tidak boleh dibayarkan full.	Adanya pengecualian untuk Kegiatan survey ini untuk tahun yang akan datang,kalau memang masih ada survey hendak nya msh bisa di naikan SPJ nya	
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp.16.065.000	Rp.13.450.000	Pada kegiatan ini belanja perjalanan dinas tidak dapat di bayarkan sepenuhnya dikarenakan banyak memenuhi undangan kegiatan fullboard dan fullday, dan ini sudah diatur pada standar biaya tidak boleh dibayarkan full.	Adanya pengecualian untuk Kegiatan survey ini untuk tahun yang akan datang,kalau memang masih ada survey hendak msh bisa di naikan SPJ nya	
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp.128.675.000	Rp.31.898.400			
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.7.665.000	Rp.3.910.000	Pada kegiatan ini belanja perjalanan dinas tidak dapat di bayarkan sepenuhnya dikarenakan banyak memenuhi undangan kegiatan fullboard dan fullday, dan ini sudah diatur pada standar biaya tidak boleh dibayarkan full		
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp.121.010.000	Rp.27.988.400	1.Tidak ada pencairan Insentif Covid 19 karna sudah tidak ada lagi Kasus yang di danai dengan anggaran yang sudah di anggarakan. 2. tidak terlaksananya Rekrutmen Tenaga Perawat Jorong	Regulasi perekrutan tenaga NON ASN harus lebih jelas sehingga dana yang sudah di alokasikan bisa di pergunakan sebagaimana mestinya	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.12.500.000	Rp.9.675.000			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.12.500.000	Rp.9.675.000	1.Lupa menaikkan SPJ Snack Sosialisasi edaran terbaru tentang UKOM, 2.Transportasi tim penguji tidak bisa di spjkan karna letak nya di entrain SIPD perjalanan dinas Biasa, setelah di pindahkan waktu pergerseran pengelola keuangan tidak ACC lagi untuk di naikan SPJ yang sudah lewat kegiatannya dan mereka lupa memasukkan dalam rekap yang akan di cairkan sehingga dana nya tidak cukup	Lebih hati-hati lagi dalam pengentrian di SIPD agar tidak ada permasalahan lagi saat pencairan untuk kegiatan UKOM tersebut.	
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp.359.017.500	Rp.228.466.650			
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.63.258.000	Rp.54.548.650			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.63.258.000	Rp.54.548.650	Bimbingan teknis pada penanggung jawab 2 sarana UMOT tidak terlaksana karena 1 umot tidak beroperasi dan 1 umot masih berproses dalam pembuatan rumah produksi	Melakukan pembinaan kepada 1 umot yang masih berproses	
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp.50.000.000	Rp.23.309.500			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp.50.000.000	Rp.23.309.500	Perjalanan dinas pada subkegiatan ini dibiayai oleh APBD, sehingga belanja perjalanan dinas tdk terealisasi.	Adanya sinkronisasi antara Dinkes Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan SIK, agar tidak overlapping dlm penganggaran	
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.121.390.000	Rp.101.525.500			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.121.390.000	Rp.101.525.500	Kelebihan anggaran adalah perjalanan dinas dan BBM disebabkan karena Perjalanan dinas dilaksanakan untuk penerbitan izin IRT (SPP-IRT) sesuai dengan permohonan perizinan IRT yang masuk/diajukan oleh pelaku usaha	Tidak ada kendala kegiatan, kelebihan anggaran adalah perjalanan dinas dan BBM disebabkan karena Perjalanan dinas dilaksanakan untuk penerbitan izin IRT (SPP-IRT) sesuai dengan permohonan perizinan IRT yang masuk/diajukan oleh pelaku usaha	
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp.17.217.500	Rp.4.087.500			
				Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Rp.17.217.500	Rp.4.087.500	Kegiatan diprogram ini berkaitan dengan keberadaan labkesda, sementara labkesda pasaman barat baru diresmikan tanggal 11 November 2022.	Berkoordinasi dengan bagian organisasi tentang kendala rekomendasi labkes dari propinsi yang belum keluar.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUK REKOMENDASI DASIS DPRD
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp.107.152.000	Rp.44.995.500			
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp.107.152.000	Rp.44.995.500	Ada beberapa IRTTP yang dikunjungi sudah tidak operasional dan tidak ada ditempat Parameter pengujian sampel tidak semua dipenuhi karena tidak tersedianya atau keterbatasan uang muka untuk pengujian sampel namun target fisik sampel	Update data IRTTP Tersedia uang muka untuk pengujian sampel	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp.203.334.000	Rp.155.013.250			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.178.334.000	Rp.136.649.250			
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.178.334.000	Rp.136.649.250	Tidak ada kendala kegiatan, kelebihan anggaran pada paket meeting.	Menyesuaikan anggaran untuk setiap kegiatan	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.25.000.000	Rp.18.364.000			
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp.25.000.000	Rp.18.364.000	Tidak terlaksananya perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat	Menyesuaikan rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan di DPA	
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.160.908.000	Rp.133.359.500	Kenaikan harga BBM mengurangi volume perjalanan dinas		

#### Keterangan

:

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat *outcome* yang segera terlihat setelah *output* dicapai (*immediate outcome*). Contoh: pembangunan jalan, *output*nya adalah: panjang jalan yg terbangun, *outcomenya* adalah peningkatan sosial dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan *immediate outcomenya* antara lain adalah waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yg dibangun

### 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINGJUT REKOMEND
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan	...../.....	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.44.738.000	Rp.32.333.616	Pada kegiatan ini belanja perjalanan dinas tidak dapat di bayarkan sepenuhnya dikarenakan banyak memenuhi undangan kegiatan fullboard dan fullday, dan ini sudah diatur pada standar biaya tidak boleh dibayarkan full.	Berkoordinasi dengan OPD yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan dokumen	ASLDDDD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.29.189.000	Rp.18.080.900	Pada kegiatan ini belanja perjalanan dinas tidak dapat di bayarkan sepenuhnya dikarenakan banyak memenuhi undangan kegiatan fullboard dan fullday, dan ini sudah diatur pada standar biaya tidak boleh dibayarkan full.	Berkoordinasi dengan OPD yang berhubungan dengan evaluasi Kinerja	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.59.030.886.262	Rp.56.131.099,647	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.7.540.680.000	Rp.7.319.117.000	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.493.170.000	Rp.394.585.000	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.112.550.000	Rp.59.809.250	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.286.524.500	Rp.253.113.500	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (IFK)	Rp.33.715.000		Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.165.847.980	Rp.147.056.000	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.25.310.205	Rp.25.193.750	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.341.057.000	Rp.315.000.000	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.280.347.115	Rp.229.877.770	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini		

3.2 Kebijakan Strategis

Kebijakan Strategi yang diterapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Penerapan sistem money follow program Reformasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan		
	Menjamin ketersediaan SDM aparatur yang professional		
	Mengoptimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses		
	perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat		
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien		
	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko kematian		
	Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI (Universal Child Immunization)		
	Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS		
	Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting		
	Menjamin ketersediaan SDM aparatur yang professional		
	Mengoptimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien		

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko kematian	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;	Dinas Kesehatan secara keseluruhan telah melaksanakan rekomendasi dari DPRD baik itu secara individu maupun secara Organisasi. Akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan dari skala prioritas program yang ada. Semula SPM merupakan skala prioritas, dengan adanya Pandemi covid -19 ini skala prioritasnya menjadi Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19, sehingga mempengaruhi pencapaian dari program SPM
2	Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI (Universal Child Immunization)	2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;	
3	Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;	
4	Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting	4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;	
		5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;	
		6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;	
		7. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
		8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;	
		9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	
		10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
		11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;	
		12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;	

5	Penguatan sistem surveilans gizi	13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	
6	Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan	14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;	
7	Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi	15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;	
8	penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dengan mengutamakan UKM dan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta	16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	
9	Penguatan kampanye nasional dan strategi komunikasi untuk perubahan perilaku sampai pada keluarga (sistem PIS-PIK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga)	17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;	
		18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;	
		19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/V/2008 tentang Juknis Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;	
		20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);	
		21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
		22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	
		23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah	
		24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;	
		25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.	

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (Tahun 2021)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan Azas Skala prioritas dan jangka waktu dalam efisiensi kegiatan dalam sisa tahun anggaran, sehingga seluruh kegiatan fisik dan Non fisik dapat terlaksana dengan baik, baik dan Time Schedule kegiatan yang telah ditentukan, sehingga tidak menimbulkan Silpa Anggaran yang besar.	Dinas Kesehatan akan membuat POA dari setiap kegiatan, agar semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun, di saat tahun berjalan muncul wabah covid yang membuat focus kegiatan dialihkan untuk menangani wabah tsb, dan anggaran di dinas kesehatan bertambah untuk penganggulanngan wabah tsb.	
2	Pustu Se-Pasaman Barat di dapatkan Fakta banyak Polindes dan pustu yang rusak dan tidak layak pakai, untuk itu diharapkan Dinas Kesehatan dapat menyusun Rencana anggaran bangunan ( RAB ) dan data-data sarana pelayanan yang rusak dan di masukan pada Anggaran Tahun 2023	Data semua keadaan pustu di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Pasaman Barat sudah ada pada data aset dinas kesehatan. Untuk memperbaiki fasilitas kesehatan tersebut secara keseluruhan tidak bisa dianggarkan karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, dilakukan prioritas dalam mealkukan rehab pustu tersebut yang dilakukan secara bertahap. Untuk polindes sudah diserahkan kepemilikannya kepada nagari.	
3	Dinas Kesehatan Perlu untuk pro aktif menjemput bola baik ke Propinsi maupun Pusat untuk mendapatkan tenaga kesehatan baik yang PNS, PTT maupun tenaga lainnya yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Pasaman Barat	Dinas kesehatan sudah melakukan kegiatan advokasi baik ke pusat maupun provinsi untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang kurang dan sangan diperlukan dalam memberikan peayanan. Hal ini sudah diwujudkan dalam penempatan tenaga nusantara sehat yang ada di puskesmas-puskesmas yang mengusulkan kebutuhan tenaga tersebut.	

4	<p>Dinas kesehatan diharapkan agar lebih dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, sehingga diharapkan Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang Optimal dan Maksimal sesuai yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak hanya sebagai terminal bagi orang sakit sebelum dikirim ke RSUD atau rumah sakit lainnya. Peningkatan sarana dan tenaga ahli pada RSUD, Puskesmas akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat</p>	<p>Dinas kesehatan selalu berupaya memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat baik secara promotif, preventif, maupun kuratif. Untuk mencapai hasil yang maksimal dinas kesehatan sudah melakukan supervisi dan pemantauan berkala kepada Puskesmas, terutama dalam hal kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dinas kesehatan juga sudah membentuk tim TPCB untuk percepatan akreditasi, yang berkaitan dengan kualitas Puskesmas. Untuk SDM kesehatan yang ada di Puskesmas sudah cukup banyak, akan tetapi penyebarannya tidak merata. Hal ini cenderung terjadi karena banyaknya kepentingan yang lain.</p>	
---	--	---	--

#### **BAB IV**

### **CAPALAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Dinas Kesehatan pada tahun 2022 tidak ada mendapatkan Dana Pembantuan dan Penugasan secara khusus dana yang ada adalah Dana APBD dan Dana DAK Fisik dan Non Fisik